



**PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

LAPORAN EVALUASI PENYELENGGARAAN MAL PELAYANAN PUBLIK TANAH LAUT TAHUN 2025



**MAL
PELAYANAN
PUBLIK**

KABUPATEN TANAH LAUT

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT karena atas rahmat Nya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Laut dapat melaksanakan Evaluasi Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik Tanah Laut untuk yang pertama kalinya peresmian pada tanggal 11 Juni 2025 oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dalam penyelenggaraan kegiatan ini, karena saran dan masukan dari peserta yang hadir merupakan hal-hal yang menjadi dasar dalam perbaikan kualitas pelayanan Mal Pelayanan Publik Tanah Laut nantinya.

Pelaihari, 19 November 2025

Kepala DPMPTSP
Kabupaten Tanah Laut,



BUDI ANDRIAN SUTANTO, S.Sos, MM
Pembina (IV/a)
NIP. 19660708 199303 1 002

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan perlu peningkatan kualitas Pelayanan Publik kepada masyarakat berupa pelayanan secara cepat, mudah, terjangkau, nyaman, dan aman maka Pemerintah Kabupaten Tanah Laut telah menyelenggarakan Mal Pelayanan Publik yang telah diresmikan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pada tanggal 11 Juni 2025.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik Pasal 7 disebutkan bahwa DPMPTSP secara *ex-officio* adalah Penyelenggara MPP yang salah satu fungsinya adalah **pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan MPP**, karenanya hal inilah yang mendasari pelaksanaan Evaluasi Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik Tanah Laut.

2. Tujuan dan Manfaat

Tujuan kegiatan evaluasi adalah :

- a. Mengevaluasi kekurangan/kelemahan pelaksanaan layanan.
- b. Memperkuat koordinasi dan sinergi antar instansi.
- c. Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan tingkat kepuasan masyarakat atas layanan yang diberikan oleh unit penyelenggara pelayanan.

Manfaat kegiatan Forum Konsultasi Publik (FKP) adalah :

- a. DPMPTSP memperoleh masukan dari terkait kelemahan/kekurangan pelayanan MPP.
- b. Meningkatnya koordinasi dan sinergi antar instansi pengisi gerai layanan.
- c. Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan.

3. Ruang Lingkup

Evaluasi Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik Tanah Laut diselenggarakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Laut dalam bentuk tatap muka dengan melibatkan pihak terkait, khususnya instansi pengisi gerai layanan MPP Tanah Laut.

METODOLOGI PELAKSANAAN EVALUASI PENYELENGGARAAN MAL PELAYANAN PUBLIK TANAH LAUT

1. Waktu dan Tempat Pelaksanaan

Evaluasi Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik Tanah Laut diselenggarakan di Aula MPP Tanah Laut pada hari Selasa, 18 November 2025 pada pukul 09.00 WITA s.d. selesai.

2. Penyelenggara dan Peserta Evaluasi Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik Tanah Laut

Evaluasi Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik Tanah Laut dipimpin oleh Asisten Perekonomian Pembangunan dan bertindak sebagai moderator yaitu Kepala DPMPTSP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Laut. Adapun pihak terkait yang dilibatkan dalam kegiatan ini yaitu :

- a. Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan.
- b. Asisten Bidang Administrasi Umum.
- c. Kepala Unit Pelayanan pendapatan Daerah/ Samsat Pelaihari.
- d. Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari.
- e. Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tanah Laut.
- f. Kepala Kementerian Agama Kabupaten Tanah Laut.
- g. Ketua Pengadilan Agama Pelaihari.
- h. Kepala Kejaksaan Tanah Laut.
- i. Kepala Kepolisian Resort Tanah Laut.
- j. Kepala Kantor Pelayanan dan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan Pelaihari.
- k. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Laut.
- l. Kepala Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tanah Laut.
- m. Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Kabupaten Tanah Laut.
- n. Kepala BPJS Kesehatan Cabang Kabupaten Tanah Laut.
- o. Kepala Kantor Urusan Agama Kabupaten Tanah Laut.
- p. Pimpinan Bank Kalsel Kantor Cabang Pelaihari.
- q. Direktur PT Air Minum Berkah Banua.
- r. Ketua Koperasi Pegawai Negeri Tuntung Pandang.

- s. Direktur Bank Perekonomian Rakyat (BPR) Tanah Laut.
- t. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut.
- u. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Laut.
- v. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tanah Laut.
- w. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan (DPUPRP) Kabupaten Tanah Laut.
- x. Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanah Laut.
- y. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut.
- z. Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Tanah Laut.
- aa. Analis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Organisasi Setda Kabupaten Tanah Laut

3. Metode Pelaksanaan Evaluasi Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik Tanah Laut

Evaluasi Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik Tanah Laut diselenggarakan dengan metode tatap muka.

4. Susunan Acara Evaluasi Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik Tanah Laut

Susunan acara Evaluasi Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik Tanah Laut terdiri dari :

- a. Pembukaan oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan.
- b. Paparan mengenai Evaluasi Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik Tanah Laut oleh Kepala DPMPPTSP Kabupaten Tanah Laut;
- c. Masukan kritik/saran dari peserta terhadap Evaluasi Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik Tanah Laut.

HASIL PELAKSANAAN EVALUASI PENYELENGGARAAN MAL PELAYANAN PUBLIK TANAH LAUT

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan masukan dari peserta Evaluasi Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik Tanah Laut, maka beberapa identifikasi masalah yang berhasil terjaring yaitu:

1. Tempat pelayanan perpanjangan SIM belum representatif.
2. Parkir pengunjung MPP belum memadai.
3. Masih terdapat calo pelayanan pada gerai BPJS Kesehatan.
4. Jaringan internet kurang stabil yang mempengaruhi *upload* dokumen pelayanan.
5. Gerai layanan Pengadilan Negeri terdapat rembesan air hujan yang berisiko merusak peralatan elektronik yang ada di gerai.
6. Belum optimalnya sosialisasi gerai layanan Kejaksaan Negeri Tanah Laut.
7. Pelayanan Kesehatan pada gerai Dinas Kesehatan masih terkendala kurangnya jumlah tenaga SDM untuk pemberian pelayanan.
8. Pelayanan gerai DPUPRP tidak maksimal dengan jumlah kehadiran 14% saja terhitung dari bulan Juni s.d. Oktober 2025 sehingga mempengaruhi pelayanan.
9. Pernikahan yang digelar di MPP masih dipungut biaya karena dianggap pernikahan di luar KUA.
10. Gerai KUA belum memiliki ruangan khusus untuk penasihatan perkawinan.
11. Belum adanya insentif tambahan untuk petugas pelayanan sebagai bentuk penghargaan dalam memberikan pelayanan.

2. Analisis

A. Tempat pelayanan perpanjangan SIM belum representatif.

Pelayanan perpanjangan SIM dilakukan di bus yang terparkir di halaman depan MPP sehingga menyebabkan kurangnya kenyamanan dalam pemberian pelayanan dalam hal :

- Ruang tunggu yang tidak memadai.
- Rawannya keamanan peralatan perpanjangan SIM yang ada dalam bus.

B. Parkir pengunjung MPP belum memadai.

Parkir pengunjung MPP belum selesai dikerjakan oleh DPUPRP sehingga mengakibatkan pengunjung kesulitan menempatkan kendaraan mereka disekitar halaman MPP, khususnya untuk parkir kendaraan roda empat.

C. Masih terdapat calo pelayanan pada gerai BPJS Kesehatan.

Masih ditemukannya calo Pengguna layanan BPJS Kesehatan sehingga mengakibatkan permasalahan di Rumah Sakit ketika sidik jari yang digunakan adalah sidik jari calo dan bukannya sidik jari pemohon layanan.

D. Jaringan internet kurang stabil yang mempengaruhi *upload* dokumen pelayanan.

Jaringan internet kurang stabil sangat berpengaruh ketika petugas *frontliner* *upload* berkas pelayanan.

E. Gerai layanan Pengadilan Negeri terdapat rembesan air hujan yang berisiko merusak peralatan elektronik yang ada di gerai.

Rembesan air hujan di gerai layanan Pengadilan Negeri sangat berisiko merusak peralatan elektronik yang ada, selain itu juga dapat mengganggu jalannya pemberian pelayanan kepada pengguna layanan disebabkan adanya genangan air di sekitar gerai.

F. Masih belum optimalnya sosialisasi gerai layanan Kejaksaan Negeri Tanah Laut.

Pengunjung gerai Kejaksaan Negeri masih 0% s.d. Oktober 2025 hal ini karena sosialisasi pelayanan belum optimal dilakukan.

G. Pelayanan Kesehatan pada gerai Dinas Kesehatan masih terkendala kurangnya jumlah tenaga SDM untuk pemberian pelayanan.

Pelayanan Kesehatan pada gerai Dinas Kesehatan tidak bisa maksimal dilaksanakan dikarenakan jumlah petugas masih kurang selain itu juga masih adanya pekerjaan utama yang harus dikerjakan pada instansi induk.

- H. Pelayanan gerai DPUPRP tidak maksimal dengan jumlah kehadiran 14% saja terhitung dari bulan Juni s.d. Oktober 2025 sehingga mempengaruhi pelayanan.**

Petugas pelayanan gerai DPUPRP hanya 14% saja kehadirannya s.d. Oktober 2025. Hal ini tentu saja mempengaruhi pemberian pelayanan PBG dan Tata Ruang kepada pengguna layanan yang datang ke MPP.

- I. Pernikahan yang digelar di MPP masih dipungut biaya karena dianggap pernikahan di luar KUA.**

Adanya pungutan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) untuk pernikahan di MPP dianggap memberatkan bagi pengguna layanan KUA yang hendak melangsungkan pernikahan di MPP.

- J. Gerai KUA belum memiliki ruangan khusus untuk penasihat perkawinan.**

Gerai KUA belum memiliki ruangan representatif (dalam hal ini ruangan tertutup) untuk penasihat perkawinan.

- K. Belum adanya insentif tambahan untuk petugas pelayanan sebagai bentuk penghargaan dalam memberikan pelayanan.**

Petugas pelayanan yang bertugas di gerai layanan belum diberikan insentif tambahan sebagai bentuk penghargaan karena telah memberikan layanan di luar instansi induk.

3. Rencana Aksi

- A. Tempat pelayanan perpanjangan SIM belum representatif.**

Pelayanan perpanjangan SIM akan ditempatkan di sebelah kiri gedung MPP dan saat ini masih dalam tahap proses pengerjaan dari DPUPRP.

- B. Parkir pengunjung MPP belum memadai.**

Parkir pengunjung MPP masih dalam tahap proses pengerjaan dari DPUPRP dan kedepannya akan diperluas lagi dengan merehab halaman depan MPP untuk difungsikan sebagai lahan parkir pengunjung MPP yang akan dikerjakan oleh DPUPRP.

C. Masih terdapat calo pelayanan pada gerai BPJS Kesehatan.

Masih adanya calo pelayanan pada gerai BPJS Kesehatan dapat diantisipasi dengan melakukan hal-hal sebagai berikut:

- Melakukan sosialisasi kepada pengguna layanan melalui media *offline* (brosur/pamflet/dll).
- Menjaring pengguna layanan sebelum proses layanan dengan menanyakan terlebih dahulu identitas pengguna layanan.

D. Jaringan internet kurang stabil yang mempengaruhi *upload* dokumen pelayanan.

Jaringan internet kurang stabil sangat berpengaruh ketika petugas *frontliner* *upload* berkas pelayanan. hal ini terjadi karena adanya gangguan dari server Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian sehingga perlu adanya penambahan *bandwidth* yang lebih besar.

E. Gerai layanan Pengadilan Negeri terdapat rembesan air hujan yang berisiko merusak peralatan elektronik yang ada di gerai.

Rembesan air hujan di gerai layanan Pengadilan Negeri perlu segera ditindaklanjuti dengan perbaikan pada titik-titik rembesan air.

F. Masih belum optimalnya sosialisasi gerai layanan Kejaksaan Negeri Tanah Laut.

Sosialisasi gerai layanan Kejaksaan Negeri Tanah Laut belum optimal salah satunya dikarenakan Nota Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut dan Kejaksaan Negeri Tanah Laut masih dalam tahap proses penyusunan. Oleh karena itu, kedepannya akan dilakukan sosialisasi seoptimal mungkin terkait pelayanan Kejaksaan Negeri Tanah Laut yang ada di MPP baik melalui media *offline* maupun media *online* MPP dan Kejaksaan Negeri Tanah Laut sendiri.

G. Pelayanan Kesehatan pada gerai Dinas Kesehatan masih terkendala kurangnya jumlah tenaga SDM untuk pemberian pelayanan.

Pelayanan Kesehatan pada gerai Dinas Kesehatan kedepannya akan dialihkan menjadi pelayanan administratif saja (pelayanan perizinan kesehatan)

dikarenakan untuk pelayanan kesehatan terkendala dengan tenaga kesehatan yang jumlahnya kurang sehingga masih “double” pekerjaan antara pelayanan instansi induk dan pelayanan di gerai MPP.

H. Pelayanan gerai DPUPRP tidak maksimal dengan jumlah kehadiran 14% saja terhitung dari bulan Juni s.d. Oktober 2025 sehingga mempengaruhi pelayanan.

Petugas gerai layanan DPUPRP hanya 14% saja jumlah kehadirannya s.d. Oktober 2025 dikarenakan petugas banyak melakukan pekerjaan lapangan sehingga tidak dapat melakukan pelayanan pada gerai MPP. Oleh karena itu, perlu adanya penjadwalan petugas dari DPUPRP agar pelayanan di gerai MPP dapat berjalan dengan optimal. Kedepannya pelayanan gerai DPUPRP akan difokuskan pada pelayanan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Tata Ruang.

I. Pernikahan yang digelar di MPP masih dipungut biaya karena dianggap pernikahan di luar KUA.

Pernikahan yang dilangsungkan di MPP dipungut biaya (PNBP) karena dianggap pernikahan di luar KUA. Oleh karena itu, perlu adanya solusi dari pihak Kementerian Agama untuk menyikapi hal ini karena gerai KUA yang ada di MPP didasari dengan Nota Kesepahaman (MoU) antara Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dengan Kementerian Agama (termasuk beberapa Kementerian lainnya) tentang Kerja Sama Penyelenggaraan Pelayanan Publik Pada Mal Pelayanan Publik dengan Nomor 119/M.KS.00/2022 dan Nomor 8 Tahun 2022 yang seharusnya bisa memfasilitasi pernikahan yang diselenggarakan di MPP agar tidak dipungut biaya.

J. Gerai KUA belum memiliki ruangan khusus untuk penasihatan perkawinan.

Ruangan untuk penasihatan perkawinan yang diperlukan oleh gerai KUA dapat menggunakan ruangan di belakang gerai dengan menempatkan meja dan kursi sebagai pendukung layanan penasihatan perkawinan, dan kedepannya akan

diupayakan agar ruangan tersebut dapat lebih representatif lagi dengan menyediakan ruangan tertutup.

K. Belum adanya insentif tambahan untuk petugas pelayanan sebagai bentuk penghargaan dalam memberikan pelayanan.

Insentif tambahan sebagai bentuk penghargaan kepada petugas layanan dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Mengusulkan kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk menyediakan anggaran makanan/minuman bagi petugas gerai layanan.
- Mengusulkan kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk menyediakan anggaran pakaian seragam bagi petugas gerai layanan.
- Mengusulkan kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk memberikan insentif tambahan kepada petugas gerai layanan.

PENUTUP

Berdasarkan hasil pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik Tanah Laut, maka identifikasi masalah yang harus segera dilakukan rencana aksinya yaitu:

1. Tempat pelayanan perpanjangan SIM belum representatif.
2. Parkir pengunjung MPP belum memadai.
3. Masih terdapat calo pelayanan pada gerai BPJS Kesehatan.
4. Jaringan internet kurang stabil.
5. Rembesan air hujan pada gerai Pengadilan Negeri.
6. Sosialisasi pelayanan gerai Kejaksaan Negeri Tanah Laut belum optimal.
7. Pelayanan kesehatan pada gerai Dinas kesehatan terkendala dengan terbatasnya jumlah petugas.
8. Ketidakhadiran petugas layanan DPUPRP paling tinggi (85%).
9. Pernikahan di MPP masih dipungut biaya (PNBP).
10. Belum adanya ruangan untuk penasihat perkawinan.
11. Belum adanya insentif tambahan untuk petugas pelayanan.

Keseluruhan identifikasi masalah tersebut merupakan saran/masukan dari peserta yang menghadiri pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik Tanah Laut dan dituangkan ke dalam Notulen Rapat (terlampir). Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Laut selaku penyelenggara pelayanan publik berkomitmen untuk segera menindaklanjuti saran/masukan tersebut sebagai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.

LAMPIRAN I

SURAT UNDANGAN



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan A. Syairani No 36, Pelaihari, Kab. Tanah Laut, Kalimantan Selatan 70814
Telepon (0512) 21003 Faksimile (0512) 21300
Laman <https://setda.tanahlautkab.go.id> Pos-el setdatanahlautkab@gmail.com

Pelaihari, 14 November 2025

Nomor : 000.8.3.4/3/DPMPTSP/2025
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (Satu) Lembar
Hal : Evaluasi Penyelenggaraan MPP Tanah Laut Tahun 2025

Yth. Daftar Terlampir

di-

Pelaihari

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik Pasal 7 disebutkan bahwa DPMPTSP secara *ex-officio* adalah Penyelenggara MPP yang salah satu fungsinya adalah **pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan MPP**, maka bersama ini bapak ibu saudara(i) diundang untuk berhadir pada :

Hari/tanggal : Selasa, 18 November 2025

Waktu : 08.45 Wita s.d selesai

Tempat : Ruang Rapat Mal Pelayanan Publik (MPP) Kab. Tanah laut

Acara : Evaluasi Penyelenggaraan MPP Tanah Laut Tahun 2025

Demikian disampaikan, atas kehadiran dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

a.n Bupati Tanah Laut
Sekretaris Daerah



Ismail Fahmi, SE, MT
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 197311281998031008

Tembusan disampaikan Kepada Yth. :

1. Bupati Tanah Laut (Sebagai Laporan);
2. Wakil Bupati Tanah Laut (Sebagai Laporan).

Lampiran : Evaluasi Penyelenggaraan MPP
Tanah Laut Tahun 2025
Nomor : 000.8.3.4/3/DPMTSP/2025
Tanggal : 14 November 2025

DAFTAR NAMA PENERIMA

1. Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan.
2. Asisten Bidang Administrasi Umum.
3. Kepala Unit Pelayanan pendapatan Daerah/ Samsat Pelaihari.
4. Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari.
5. Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tanah Laut.
6. Kepala Kementerian Agama Kabupaten Tanah Laut.
7. Ketua Pengadilan Agama Pelaihari.
8. Kepala Kejaksaan Tanah Laut.
9. Kepala Kepolisian Resort Tanah Laut.
10. Kepala Kantor Pelayanan dan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan Pelaihari.
11. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Laut.
12. Kepala Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tanah Laut.
13. Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Kabupaten Tanah Laut.
14. Kepala BPJS Kesehatan Cabang Kabupaten Tanah Laut.
15. Kepala Kantor Urusan Agama Kabupaten Tanah Laut.
16. Pimpinan Bank Kalsel Kantor Cabang Pelaihari.
17. Direktur PT Air Minum Berkah Banua.
18. Ketua Koperasi Pegawai Negeri Tuntung Pandang.
19. Direktur Bank Perekonomian Rakyat (BPR) Tanah Laut.
20. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut.
21. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Laut.
22. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tanah Laut.
23. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan (DPUPRP) Kabupaten Tanah Laut.
24. Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanah Laut.
25. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut.
26. Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Tanah Laut.
27. Analis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Organisasi Setda Kabupaten Tanah Laut.

LAMPIRAN II

TINDAK LANJUT SARAN/MASUKAN

Berdasarkan hasil Evaluasi Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik yang dilaksanakan pada hari Selasa, 18 November 2025, maka beberapa hal yang menjadi permasalahan yaitu:

No.	Identifikasi Masalah	Usulan Rekomendasi Perbaikan	Jangka Waktu Penyelesaian
1.	Tempat pelayanan perpanjangan SIM belum representatif.	Pelayanan perpanjangan SIM akan ditempatkan di sebelah kiri gedung MPP dan saat ini masih dalam tahap proses pengerjaan dari DPUPRP	1-2 bulan
2.	Parkir pengunjung MPP belum memadai	Parkir pengunjung MPP masih dalam tahap proses pengerjaan dari DPUPRP dan kedepannya akan diperluas lagi dengan merehab halaman depan MPP untuk difungsikan sebagai lahan parkir pengunjung MPP yang akan dikerjakan oleh DPUPRP	6-10 bulan
3.	Masih terdapat calo pelayanan pada gerai BPJS Kesehatan	Melakukan sosialisasi kepada pengguna layanan melalui media <i>offline</i> (brosur/pamflet/dll). Menjaring pengguna layanan sebelum proses layanan dengan menanyakan terlebih dahulu identitas pengguna layanan.	1 bulan
4.	Jaringan internet kurang stabil yang mempengaruhi <i>upload</i> dokumen pelayanan	Penambahan <i>bandwidth</i> yang lebih besar	6 bulan
5.	Gerai layanan Pengadilan Negeri terdapat rembesan air hujan yang berisiko merusak peralatan elektronik yang ada di gerai	Perbaikan pada titik-titik rembesan air	1 minggu
6.	Belum optimalnya sosialisasi gerai layanan Kejaksaan Negeri Tanah Laut	Sosialisasi seoptimal mungkin terkait pelayanan Kejaksaan Negeri Tanah Laut yang ada di MPP baik melalui media <i>offline</i> maupun media <i>online</i> MPP dan Kejaksaan Negeri Tanah Laut sendiri	1-2 bulan
7.	Pelayanan Kesehatan pada gerai Dinas Kesehatan masih terkendala kurangnya jumlah tenaga SDM untuk pemberian pelayanan	Pelayanan Kesehatan pada gerai Dinas Kesehatan kedepannya akan dialihkan menjadi pelayanan administratif saja (pelayanan perizinan kesehatan)	1-2 bulan
8.	Pelayanan gerai DPUPRP tidak maksimal dengan jumlah kehadiran 14% saja terhitung dari bulan Juni s.d. Oktober 2025 sehingga mempengaruhi pelayanan	Perlu adanya penjadwalan petugas dari DPUPRP agar pelayanan di gerai MPP dapat berjalan dengan optimal	1 minggu

No.	Identifikasi Masalah	Usulan Rekomendasi Perbaikan	Jangka Waktu Penyelesaian
9.	Pernikahan yang digelar di MPP masih dipungut biaya karena dianggap pernikahan di luar KUA	Perlu adanya solusi dari pihak Kementerian Agama untuk menyikapi hal ini karena gerai KUA yang ada di MPP didasari dengan Nota Kesepahaman (MoU) antara Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dengan Kementerian Agama (termasuk beberapa Kementerian lainnya) tentang Kerja Sama Penyelenggaraan Pelayanan Publik Pada Mal Pelayanan Publik dengan Nomor 119/M.KS.00/2022 dan Nomor 8 Tahun 2022 yang seharusnya bisa memfasilitasi pernikahan yang diselenggarakan di MPP agar tidak dipungut biaya	1-2 bulan
10.	Gerai KUA belum memiliki ruangan khusus untuk penasihatan perkawinan	Gerai KUA dapat menggunakan ruangan di belakang gerai dengan menempatkan meja dan kursi sebagai pendukung layanan penasihatan perkawinan (kedepannya akan diupayakan agar ruangan tersebut dapat lebih representatif lagi dengan menyediakan ruangan tertutup).	1-2 bulan
11.	Belum adanya insentif tambahan untuk petugas pelayanan sebagai bentuk penghargaan dalam memberikan pelayanan	Mengusulkan kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk menyediakan anggaran makanan/minuman bagi petugas gerai layanan. Mengusulkan kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk menyediakan anggaran pakaian seragam bagi petugas gerai layanan. Mengusulkan kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk memberikan insentif tambahan kepada petugas gerai layanan	1-2 bulan

LAMPIRAN III

SALINAN DAFTAR HADIR

DAFTAR HADIR

HARI/TANGGAL : Selasa, 18 November 2025
 TEMPAT : Ruang Rapat MPP Kab. Tanah Laut
 ACARA : Rapat Evaluasi MPP Tahun 2025

NO	NAMA	PIL	USIA	JABATAN	NO HP	TANDA TANGAN
1	Budi A.	L		Kadis		
2	Amelis Emy	L	46	Ka. Badan	0812505278	
3	Hekha Kh	L	41	Pl. Tanah Laut	0816253401	
4	Paul	L	29	Staff	08229979396	
5	Rahma K	L	40	Stekoris	08133481936	
6	Laila	P	56	Dir. Operasional PT. MIA BB	08525175200	
7	M. Haryati	L	35	KABID PPSU		
8	Satriani	L	41	08215534662 Bng. Pem		
9	Juli Oktavia	P	44	Kabid K. dan	08254847344	
10	Wahyu F.	L	41	Pranorm	08549550023	
11	Rinanti	L	37	Disrup	0853263444	
12	CIRKam.	L	56	Bag. Gen.	0852483514	
13	Afrat S	P	40	K-TU	08524270300	
14	Murati Shaleh	P	34	Banruw Perumahan	081349462812	
15	Rutra	L	32	Staff Datin		

NO	NAMA	PIL	USIA	JABATAN	NO HP	TANDA TANGAN
18	Bella Enjelin	P	25	PAK	08317361085	
19	H. Agus G.	L	56	BATMAN	08215199599	
20	Eryda. W	P	31	Op. Kamp	08521160859	
21	M. Taufik H.	L	25	Sat. Intel	08134615494	
22	Hamdy Ferry	P	25	Staff Datin	-	
23	Rismati	L	41	PENATA	-	
24	Auliana	P	38	Kagis Pety	08135193875	
25	Budhy Su	P	52	Koordinator BAN	08524593870	
26	H. TARSANI	L	48	Ka. Kua P/	08524770955	
27	Francisco	P	24	PN Pelai Lari	085164280	
28	M. Kurni	L	48	KC. H	08115521479	
29	Rana Eka	P	29	PTK	08534848394	
30	M. Ridho A.	L	38	Staff	081251022055	
31	Sulhan A	L	26	Staff	08569601957	
32	Argawan	L	19	SEAF	08191331715	
33	Muhammad Husein	L	28	Staff	08244830099	
34	Merry. S	P	19	Staff		
35	Ade Wahyudi	L	20	Staff	08880907538	

NO	NAMA	PIL	USIA	JABATAN	NO HP	TANDA TANGAN
36	Ranita F.	P	43	Kabid DIP	08134868902	
37	Pridha	L	43		08524483663	
38	Mahyuni	L	34		08221153855	
39	Maria M	P	41	Pl. dan Tala	082223019342	
40	Emilia Wito	L	47	Bng. Pan		
41	Luthra S.	L	41	Banruw Inan PM. Hailan	08533300868	
42	Syahrudin	P	26	Pengelola Layanan	082255041075	
43	Emrohman	L	52	Koordinator		
44	Alena S	P	48	Arakid D	08135081975	
45	Fat Syamsul	L	35	Staff agn	08533300868	
46	Tommy	L	23	Staff	0811854442	
47	Kelvi	L	39	Pelaku		
48	Devi	P	38	Pelaku		
49	Kurnia	L	25	Pelaku		
50	Kurnia	L	31	Pelaku		
51	Kai	L	35	Pelaku		
52	Wati	L	35	Pelaku		
53	Kurnia	L	24	Pelaku		

NO	NAMA	PIL	USIA	JABATAN	NO HP	TANDA TANGAN
54	M. Rizky Adnan	L	27	Staff	08525972041	
55	Muhammad Faisal	L	23	Staff	08544851511	
56	Abdullah	L	21	Staff	08562002401	
57	Apriyanti	L	42	KP2K	0811738932	
58	Martajati	L	43	Kabid Jilak	0822197880	
59	Mariaul	P	44	Bend.	08533222579	
60	Giti Nurwani	P	26	Staff	0822541443	
61	Rizka A	P	27	Staff	08194819495	
62	Martina Febrian - R.	P	27	Banruw Datin	0822541070	
63	Yeyen Pagiha - R.	P	47	Staff Datin	08534570311	
64	Siti Fatimah	P	20		0852523544	
65	Evy Ariani	P	20		08125491561	
66	Nur Intan Adlin	P	20		0815585867	
67	Dita Alvin	L	22	Staff Datin	0822197880	
68	MERLY R	P	44	Staff G. P.	08194855240	
69	Rifai Hismi	L	31	Staff	08314342366	
70	Hana J. Diti	L	51	Staff	0822541070	
71	Dina	P	39	Staff	08525192089	

NO	NAMA	P/L	USIA	JABATAN	NO HP	TANDA TANGAN
72	Luthi	L	30	Staf	0877144165	
73	Pahmudji	L	36	Staf	085248218191	
74	Lidia Triandita	P	41	Staf	08125750031	
75	Devi Maharati	P	41	Staf	08125333693	
76	Movita Rusdady	P	26	Staf	08521025311	
77	Maiwida Ulfah	P	24	Staf	083189938806	
78	Akmalia Paryani	L	20	Penguluh KVA	08057705235	
79	Hartati	L	39	Penguluh KVA	0852445872	
80	Lasmi Sintaresmi	P	44	Asiparis	08525167228	
81	Della Imahandrea	P	23	Staf	082149176600	
82	Ahmad Zakara	L	23	Teller Bank	082254095029	
83	Junida Eka M	P	33	Staff	012199740081	
84	Arief Rukhrani	L	32	Staff	082253067999	
85	Aida Widiara	P	18	Magang	083847308913	
86	Rusmilawati	P	50	Staf	081349383730	
87	Rozida M. H	P	25	Staf	085141437787	
88	Ash Dwi Jayanti	P	29	Staf	08227972549	
89	Dwi Istiwati	P	33	Staf	085845638880	

NO	NAMA	P/L	USIA	JABATAN	NO HP	TANDA TANGAN
90	Bejo Slamet	L	26	Scupam	08582186728	
91	M. Ricky. Y	L	28	SA + PAM	08134882085	
92	Andhika Pop	P	35	BPX K3	08115939898	
93	Noor Dia	P	18	ICP/ICNIT	08119227853	
94	Teng	P	29	Staf	08399619915	
95	Pini	P	52	Persampung	08125117229	
96	Purda P.	P	37	Staf	082981921886	
97	Rini Kikhyani	P	20	Staf	08874966679	
98	Anyani Lertan	P	21	It-1	0802411199	
99	Nurul Hidayah	P	22	Staf	083139953623	
100	M. Mihat	L	23	Staf	089836655209	

LAMPIRAN IV DOKUMENTASI KEGIATAN



